

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Serapan APBD Lolos Defisit
Entitas / Cakupan	: BPK
Sumber / Hal	: Radar Bandung/Hal.7
Edisi	: Jum'at, 5 Januari 2018

Serapan APBD Lolos Defisit

BANDUNG - Serapan APBD yang ditoreh pada 2017 dinilai sangat baik. Bahkan, Kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat dalam menggenjot sektor pajak berhasil menyelamatkan dari defisit APBD 2018.

Perlu diketahui, serapan APBD Jabar 2017 melonjak hingga mencapai angka 95,78 persen membuat target sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD 2018 terancang defisit. Patokan Silpa 2018 sebesar Rp 2 triliun. Tapi ternyata ada defisit Rp 600 miliar.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Iwa Karniwa saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (4/1). Menurutnya, angka itu sudah masuk dalam rencana belanja Pemprov Jabar 2018.

Ia menyebut, meski penyerapan tinggi pada 2017 hal itu dinilai sangat baik dan tertinggi dalam sejarah Pemprov.

"Padahal upaya menutup defisit bisa saja gagal jika pendapatan tak mencapai target lebih. Tapi tidak masalah karena Alhamdulillah tertutup over target pendapatan," katanya.

Iwa mengungkapkan, di APBD 2017 pendapatan total dipatok Rp 31,3 triliun. Hingga akhir 2017, Bapenda Jabar mampu mengejar realisasi hingga Rp 32,1 triliun atau 102,4 persen. Artinya, kekurangan Rp 600 miliar tersebut tertutup.

"Over target pendapatan



Iwa Karniwa

mencapai Rp 800 miliar," ucapnya.

Sektor pendapatan asli daerah (PAD) Jabar 2017 lalu ditargetkan mencapai Rp 17,11 triliun, tapi realisasinya menembus Rp 18,042 triliun atau 102 persen

dari pendapatan pajak kendaraan bermotor baik PKB maupun Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB) yang ditargetkan Rp 15,6 triliun, realisasinya Rp 16,4 triliun atau 105,96 persen.

"Kalau pendapatan tidak over target, ini (anggaran) defisit. Kalau tidak over target," tuturnya.

Menurutnya dari sisi serapan anggaran 2017 lalu terjadi peningkatan di saat

terakhir. Dari target anggaran Rp 34,7 triliun, realisasinya mencapai Rp 32,25 triliun atau 95,78 persen. Ini menunjukkan rencana penganggaran Pemprov sudah baik.

Capaian itu merupakan yang pertama sepanjang sejarah penyerapan anggaran Pemprov Jabar, secara absolut nilainya maupun secara persentase tertinggi.

Iwa merinci sejumlah belanja yang serapannya relatif besar. Belanja langsung, misalnya, dari target Rp 7,64 triliun, realisasinya menembus Rp 7,13 triliun atau 93,7 persen. Lalu dari belanja hibah Rp 9,86 triliun, realisasinya Rp 9,526 triliun atau 96,58 persen.

edangkan dari belanja pegawai Rp 5,19 triliun, realisasinya 5,155 triliun atau 99,16 persen.

Untuk sektor belanja bagi Rp 6,928 triliun, realisasinya Rp 6,9 triliun atau 99,05 persen. Adapun dari belanja bantuan keuangan Rp 4,5

triliun, realisasinya Rp 4,17 triliun atau 92,55 persen. Iwa memastikan dari hasil pemeriksaan BPK atas belanja APBD Jabar 2017 pun te-

muan yang ada sangat minor.

"Saya sudah minta agar kekeliruan segera diperbaiki meskipun ini belum jadi laporan," pungkasnya. (bbb)